



L A P O R A N

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI KE**

**KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
TERKAIT PENGAWASAN PERSIAPAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS**

TANGGAL 1 NOVEMBER – 3 NOVEMBER 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, NOVEMBER 2024**



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
PENGAWASAN PERSIAPAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
1 – 3 NOVEMBER 2024

A. PENDAHULUAN

Program "Makan Bergizi Gratis" adalah inisiatif strategis yang dicanangkan oleh Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Program ini merupakan bagian dari pelayanan IFSR (*Indonesia Food Security Review*) dan berkolaborasi dengan *United Nations World Food Programme* (UNWFP), serta menjadi bagian dari *School Meals Coalition*. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kelaparan, kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia.¹

Inisiatif ini menjadi salah satu program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang direncanakan untuk dimulai pada 2 Januari 2025. Program ini ditargetkan untuk menjangkau sekitar **82,9 juta penerima** selama 5 (lima) tahun ke depan. Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa "Makan Bergizi Gratis" merupakan salah satu investasi penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.² Dengan menyediakan makanan sehat dan bergizi, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok yang dilayani serta membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Dalam kerangka program ini, makanan yang disediakan mengikuti standar gizi yang ditetapkan, mencakup kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang cukup. Program ini ditujukan untuk pelajar di sekolah-sekolah dan anak-anak dalam komunitas yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis, program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat di Indonesia.

Program ini memiliki target-target spesifik untuk mencapai keberhasilan, antara lain menghilangkan kelaparan akut dan kronis serta meningkatkan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan anak-anak. Selain itu, program ini juga berfokus pada kelompok rentan lainnya, termasuk ibu hamil dan menyusui. Sasaran program dilakukan secara bertahap, dengan target 40% penerima manfaat pada tahun 2025, meningkat menjadi 80% pada tahun 2026, dan 100% pada tahun 2029.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, diperlukan persiapan yang matang, termasuk pengadaan bahan makanan, pengaturan distribusi, dan pelatihan bagi pengelola dapur umum yang terlibat dalam program ini. Diperlukan sekitar 48 ribu dapur umum untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara efektif di seluruh wilayah. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya nutrisi yang baik dan pencegahan stunting.

¹ Badan Gizi Nasional. (2024). **Panduan Program Makan Bergizi Gratis**. Jakarta: Badan Gizi Nasional.

² Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). **Statistik Kesehatan dan Gizi di Kabupaten Bogor**. Diakses dari www.bps.go.id.

Persiapan Kabupaten Bogor untuk Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kabupaten Bogor menghadapi tantangan serius terkait kesehatan dan gizi, dengan angka stunting yang masih melebihi rata-rata nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, prevalensi stunting di Kabupaten Bogor mencapai 30% pada anak-anak usia di bawah lima tahun.³ Hal ini menunjukkan bahwa satu dari tiga anak tidak mendapatkan gizi yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini meliputi akses terbatas terhadap makanan bergizi dan pendidikan gizi yang rendah. Banyak keluarga di Kabupaten Bogor kesulitan untuk mendapatkan makanan bergizi karena masalah ekonomi, yang semakin diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan banyak anak terpaksa mengonsumsi makanan yang tidak bergizi, yang dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi.

Kunjungan Kerja Spesifik ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program "Makan Bergizi Gratis" di Kabupaten Bogor. Selama kunjungan, Tim Kunker akan berinteraksi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sekolah-sekolah yang terlibat dalam program ini, serta masyarakat setempat untuk memahami tantangan dan keberhasilan program di lapangan. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan kepada mitra kerja Komisi IX DPR RI untuk peningkatan efektivitas program dan menjadikan program ini sebagai model untuk penerapan serupa di daerah lain di Indonesia.

B. LANDASAN

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (4) huruf d, serta ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.
2. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI, tanggal 24 Oktober 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program "Makan Bergizi Gratis" di Kabupaten Bogor.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam persiapan pelaksanaan program "Makan Bergizi Gratis" di Kabupaten Bogor.

D. KELUARAN

Output dari Kunjungan Kerja ini adalah laporan komprehensif tentang persiapan pelaksanaan program, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk peningkatan efektivitas program "Makan Bergizi Gratis."

³ Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. (2024). **Laporan Kesehatan Masyarakat dan Upaya Penanggulangan Stunting**. Bogor: Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Hasil dari kunjungan kerja spesifik ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Bupati Bogor dengan Pj. Bupati Bogor dan didampingi oleh:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Kapolres Bogor
4. Kepala Sekolah dan Perwakilan Orang Tua SD Negeri Nanggewer 01, SD Negeri Sentul 02, dan SD Negeri Sentul 03

Didampingi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, yaitu:

- o Kementerian Kesehatan RI
- o Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI)
- o Badan Gizi Nasional (BGN RI)

F. DAFTAR NAMA TIM KUNJUNGAN KERJA

[TERLAMPIR]

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Bogor akan dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 November 2024.

H. HASIL KUNJUNGAN KERJA

DESKRIPSI

- Kabupaten Bogor telah terpilih sebagai *pilot project* untuk implementasi program "Makan Bergizi Gratis," yang merupakan salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
- Program "Makan Bergizi Gratis" bertujuan untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan asupan gizi seimbang yang sesuai dengan standar kesehatan, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak.
- Sebelumnya, program ini telah dilaksanakan melalui pola orang tua asuh dari Wakil Presiden RI, yang dimulai pada Mei 2024 dan berlangsung hingga Oktober 2024 di empat lokasi: SDN Sentul 2, SDN Sentul 3, SDN Hambalang 2, dan SDN Hambalang 5. Total peserta mencapai 1.880, terdiri dari 1.821 siswa dan 59 guru.
- Pada bulan Agustus 2024, Pemkab Bogor juga melakukan program makan gratis bekerja sama dengan Polres Bogor di tiga lokasi, yaitu

SMPN 2 Babakan Madang, SDN 4 Nanggewer Cibinong, dan SDN 1 Cikeas Sukaraja, dengan total 1.297 siswa.

- Kunjungan Komisi IX DPR RI difokuskan pada uji coba program di SDN 01 Pakansari, Cibinong, di mana program dilaksanakan pada 1-7 November 2024 untuk 665 siswa. Makanan disediakan dengan biaya Rp 15.000 per porsi, mencakup nasi, lauk, sayur, buah, dan susu.
- Program ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bogor untuk memperluas akses gizi yang baik melalui kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk program CSR yang dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, 5, dan 6 November 2024.
- Ada antusiasme dari anak-anak saat mengikuti program ini.

EVALUASI TEMUAN DI LAPANGAN

1. Standar Gizi: Makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan protein, vitamin, dan mineral. Menu makanan yang disajikan dianggap lengkap dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
2. Selera Anak: Pentingnya mempertimbangkan selera anak-anak untuk memastikan makanan yang disajikan diminati dan tidak terbuang. Komisi IX DPR RI menekankan agar menu makanan disesuaikan dengan preferensi siswa.
3. Keamanan Pangan: Tugas pengawasan keamanan makanan menjadi tanggung jawab Puskesmas dan Kementerian Kesehatan. Ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.
4. Waktu Pemberian Makanan: Penjadwalan waktu pemberian makanan menjadi perhatian, agar tidak mengganggu waktu pelajaran. Rekomendasi agar pemberian makanan dilakukan pada waktu istirahat sehingga siswa dapat menikmati tanpa terburu-buru.

I. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil peninjauan dan diskusi di RSUD Kabupaten Tangerang, Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemkab Bogor yang telah melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis dan mendorong pemerintah daerah untuk terus melaksanakan program ini secara luas. Rekomendasi ini mencakup pengembangan kapasitas di lebih banyak sekolah, dengan target jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan seluruh siswa di Kabupaten Bogor mendapat akses makanan bergizi.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI dan Badan Gizi Nasional untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam implementasi program MBG

untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan program.

3. Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan sosialisasi yang lebih luas kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi seimbang bagi anak-anak, khususnya terkait pola makan sehat dan kebiasaan gizi yang baik harus menjadi bagian dari program, sehingga masyarakat memahami manfaat dan mendukung pelaksanaan program.
4. Komisi IX DPR RI meminta pembentukan tim monitoring yang terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program MBG. Tim ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan temuan di lapangan, termasuk analisis data mengenai jumlah siswa yang menerima manfaat dari program.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BGN melakukan pelatihan bagi pengelola dapur umum dan tenaga pendidik dalam menyediakan dan menyajikan makanan yang bergizi. Peningkatan kualitas SDM juga harus diperhatikan dalam hal penanganan keamanan pangan untuk mencegah masalah kesehatan yang mungkin timbul dari konsumsi makanan.
6. Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya penyesuaian menu makanan yang disediakan agar sesuai dengan selera anak-anak. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan harus bekerja sama untuk melakukan survei atau studi pendahuluan tentang preferensi makanan anak, sehingga makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga disukai dan diterima oleh siswa.

J. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat disampaikan. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 November 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KETUA TIM,**

M. YAHYA ZAINI, S.H.

(A-331)